



*Jurnal Penelitian*

**POLITIK**

Vol.14, No.1, Juni 2017

# TRANSFORMASI IDENTITAS KEINDONESIAAN

- Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru
- Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia
- Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) dalam Pemilu Pilkada DKI 2012
- Peranakan dan Serat Kekancangan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta
- Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan

## RESUME PENELITIAN

- Peran Kerja sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN
- Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan

## REVIEW BUKU

- Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 14	No. 1	Hlm. 1-108	Jakarta, Juni 2017	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal  
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial- politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

**Mitra Bestari**

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)  
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)  
Dr. C.P.F. Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)  
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)  
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)  
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)  
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)

**Penanggung Jawab  
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI  
Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si

**Dewan Redaksi**

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)  
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)  
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)  
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)  
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

**Redaksi Pelaksana**

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)  
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

**Sekretaris Redaksi**

Esty Ekawati, S.IP., M.IP  
Devi Darmawan, SH

**Produksi dan Sirkulasi**

Adiyatnika, A.Md  
Prayogo, S.Kom

**Alamat Redaksi**

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com  
*Website*: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

**ISSN**

1829-8001  
Terakreditasi No. 726/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	i
<b>Catatan Redaksi</b>	iii
<b>Artikel</b>	
• <b>Dikotomi Identitas Keindonesiaan dan Kepapuaan Pasca Orde Baru</b> Aisah Putri Budiatri	1–15
• <b>Memaknai Kelas Menengah sebagai Aktor Demokrasi Indonesia</b> Wasisto Raharjo Jati	17–29
• <b>Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara dan Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI): dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012</b> Dina Fadiyah	31–44
• <b>Peranakan dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta</b> Septi Satriani	45–54
• <b>Transformasi Pancasila dan Identitas Keindonesiaan</b> Siswanto	55–68
<b>Resume Penelitian</b>	
• <b>Peran Kerja Sama IMT-GT dalam Pembangunan Konektivitas ASEAN</b> Sandy Nur Ikfal Raharjo, dkk	69–83
• <b>Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan</b> Siswanto, dkk	85–98
<b>Review Buku</b>	
• <b>Bahasa sebagai Arena dan Instrumen Kekuasaan</b> Anggi Afriansyah	99–106
<b>Tentang Penulis</b>	107–108
<b>Pedoman Penulisan</b>	109–113

## CATATAN REDAKSI

Arus Globalisasi yang melanda dunia telah membawa perubahan sosial, politik, ekonomi dan budaya. Perubahan tersebut bisa bernilai positif jika globalisasi dimaknai secara bijak. Namun tak sedikit dampak negatif ditimbulkan oleh globalisasi akibat ketidakmampuan kita dalam memaknai dan menanggapi secara bijak. Indonesia, tak lepas dari arus globalisasi ini sehingga pola-pola perilaku masyarakat di segala aspek kehidupan pun bergeser. Kondisi ini memungkinkan terjadinya pergeseran identitas manusia baik itu akibat sosial-budaya maupun politik.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan lima artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan identitas Keindonesiaan. Artikel pertama yang ditulis oleh Aisah Putri Budiatri, ”Dikotomi Identitas Keindonesiaan Dan Kepapuaan Pasca Orde Baru”, memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

Artikel berikutnya, “Memaknai Kelas Menengah Sebagai Aktor Demokrasi Indonesia”. Artikel yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati ini membahas mengenai kelas menengah yang menjadi aktor baru dan menjadi identitas tersendiri dalam demokrasi di Indonesia. Tulisannya membahas mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Dan sejauh mana mereka ikut andil dalam proses demokratisasi di ruang publik. Sementara itu, artikel “Kuasa Meraih Suara: Relasi Foke-Nara Dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012” yang ditulis oleh Dina Fadiah menawarkan diskusi mengenai relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-

Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilukada DKI Jakarta 2012. temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-dimana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas menjadi identitas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

Pergeseran identitas juga terjadi di Kraton Yogyakarta yang dibahas dalam artikel “Peranakan Dan Serat Kekancingan: Sebuah Identitas Abdi Dalem Kraton Yogyakarta” yang ditulis oleh Septi Satriani. Artikel ini membahas bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

Artikel terakhir membahas tentang “Transformasi Pancasila Dan Identitas Keindonesiaan” yang ditulis oleh Siswanto. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan

bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

Selain kelima artikel terkait identitas di atas, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Artikel pertama ditulis oleh Sandy Nur Iqbal Raharjo, “Peran Kerja Sama IMT-GT Dalam Pembangunan Konektivitas Asean”. Tulisan ini menganalisis arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim.

Artikel kedua, “Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Tiongkok: Memperjuangkan Kepentingan Nasional Di Tengah Ketidakseimbangan Kekuatan”, ditulis oleh Siswanto. Artikel ini mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerjasama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (asymmetric power relations) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (bargaining position) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (nasional power) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia

sebagai negara kekuatan menengah (middle power) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan review buku karya Fathur Rokhman & Surahmat “Bahasa Sebagai Arena Dan Instrumen Kekuasaan”. Review yang ditulis Anggi Afriansyah menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya Jurnal Penelitian Politik nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai identitas Keindonesiaan. Selamat membaca.

## **Redaksi**

## Jurnal Penelitian

# POLITIK

Vol. 14, No. 1, Juni 2017

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

### **DIKOTOMI IDENTITAS KEINDONESIAAN DAN KEPAPUAAN PASCA ORDE BARU**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 1-15**

Narasi tentang dikotomi identitas keindonesiaan dan kepapuaan mewarnai hampir di setiap analisis mengenai identitas politik Papua. Kajian pendahulu berfokus pada pembahasan tentang pengalaman kolonial Belanda, sejarah integrasi Papua dan kegagalan pembangunan masa Orde Baru yang menjadi alasan kunci lahirnya pembelahan identitas antara keindonesiaan dan kepapuaan di Tanah Papua. Masa kolonial dan Orde Baru menjadi fokus studi mereka, karena pada masa ini identitas kepapuaan sebagai antitesis keindonesiaan lahir dan tumbuh semakin tajam. Lalu bagaimana dengan Pasca-Orde Baru? Tulisan ini memperlihatkan bahwa dikotomi antitesis antara identitas kepapuaan dan keindonesiaan belum selesai, meskipun beberapa upaya penyelesaian konflik, termasuk Undang-Undang Otonomi Khusus, telah diterapkan. Sebaliknya, dikotomi identitas hari ini justru semakin menajam dan berpotensi memperkeruh konflik.

**Kata kunci:** identitas, Papua, kepapuaan, keindonesiaan, konflik, paska Orde Baru

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

### **MEMAKNAI KELAS MENENGAH SEBAGAI AKTOR DEMOKRASI INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 17-29**

Tulisan ini hendak menganalisis mengenai kelas menengah sebagai aktor demokrasi di Indonesia. Membicarakan kelas menengah dalam setiap diskursus ilmu sosial dan politik di Indonesia senantiasa dihadapkan pada pembahasan ekonomi secara kuantitatif. Hal yang perlu dicatat adalah keberadaan kelas menengah ini daripada didefinisikan lebih baik dirasakan keberadaannya dalam kehidupan. Posisi kelas menengah sebagai aktor politik di Indonesia masih fluktuatif. Hal ini dikarenakan kemunculan kelas menengah dalam arus demokrasi Indonesia yang masih ambigu. Kelas menengah ini bisa menjadi kelompok masyarakat yang tersubordinasi dengan negara, namun di satu sisi, kelas menengah juga tampil sebagai kelas masyarakat yang resisten dengan negara. Adanya transisi posisi dan status kelas menengah tersebut sebenarnya bisa disimak dari gerakan reformasi 1998 hingga sekarang ini. Munculnya berbagai macam gerakan politik dengan mengarustamakan demokrasi yang diinisiasi oleh kelas menengah menjadi hal yang terelakkan pasca reformasi ini. Semula, gerakan tersebut hanya berupa aksi penyampaian aspirasi dan kini sudah berkembang menjadi menjadi aksi penuntutan representasi. Adanya perubahan dalam pilihan aksi dan strategi itu menandakan bahwa kesadaran politik di kalangan kelas menengah Indonesia sendiri sudah semikian merata. Mereka tidak hanya menjadi aktor pasif secara politis namun juga aktif dalam menyuarakan aspirasi dan sekaligus pula representasinya. Menguatnya aksi representasi dari kelas menengah ini merupakan implikasi penting semakin menguatnya ranah societal terhadap

proses political, dan semakin berperannya netizen dalam menyuarakan kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Tulisan ini akan mengelaborasi lebih lanjut mengenai akar demokrasi dalam setiap episode kemunculan kelas menengah dalam demokrasi Indonesia. Sejauh mana mereka andil dalam proses demokratisasi di ruang publik.

**Kata kunci:** Demokratisasi, Kelas Menengah, Masyarakat

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

**KUASA MERAH SUARA: RELASI  
FOKE-NARA DAN FORUM  
KOMUNIKASI ANAK BETAWI  
(FORKABI) DALAM PEMILUKADA  
DKI JAKARTA 2012**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 31-44**

Tulisan ini bermaksud melihat relasi antara Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dengan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) dalam Pemilu DKI Jakarta 2012. Pada dasarnya, Forkabi berdiri karena ketakutan etnis asli Jakarta yaitu etnis Betawi akan luntur karena banyaknya suku pendatang yang ada di Jakarta. Forkabi yang awalnya berdiri berdasarkan etnisitas tetapi kemudian menjelma menjadi perpanjangan politik dari suatu elit lokal. Ormas yang seharusnya bebas dari kepentingan-kepentingan politik, justru menjadi perpanjangan politik dari Foke-Nara selama masa kampanye dalam pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2012. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan didapatkan temuan bahwa ternyata organisasi masyarakat dapat berperan penting dalam sebuah pemilihan. Terbukti dengan adanya elit-elit lokal yang saat ini gencar mengandeng ormas sebagai timsesnya. Keberhasilan pengumpulan suara yang dihasilkan oleh ormas mungkin karena anggota ormas banyak tersebar luas dimana-mana. Mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, Kecamatan, dsb. Hal ini membuktikan bahwa ormas yang ada saat ini sudah tidak dapat dikatakan independen atau tanpa adanya campur tangan politik.

**Kata kunci:** Ormas, Forkabi, Patron, Klien

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN DAN SERAT  
KEKANCINGAN: SEBUAH  
IDENTITAS ABDI DALEM KRATON  
YOGYAKARTA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 45-54**

Tulisan ini berisi tentang bagaimana peranakan dan serat kekancingan menjadi identitas abdi dalem Kraton Yogyakarta. Seperti layaknya dalam organisasi modern, keanggotaannya ditandai dengan salah satunya seragam peranakan. Peranakan tidak sekedar menggambarkan seragam abdi dalem melainkan di dalamnya terkandung makna adanya persaudaraan dan persatuan dengan Raja maupun diantara sesama abdi dalem. Penulis menyimpulkan bahwa peranakan dan serat kekancingan merupakan symbol identitas bagi abdi dalem Kraton Yogyakarta. Dengan menggunakan peranakan dan serat kekancingan maka abdi dalem Kraton Yogyakarta memiliki identitas yang berbeda dengan orang kebanyakan.

**Kata kunci :** Identitas, Abdi Dalem Keraton Yogyakarta, Peranakan, Serak Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**TRANSFORMASI PANCASILA DAN  
IDENTITAS KEINDONESIAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 55-68**

Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup semakin lama semakin ditinggalkan oleh bangsa Indonesia. Pancasila sebagai rujukan kehidupan politik dan sosial semakin melemah di tengah gempuran globalisasi yang semakin kuat mempengaruhi pola pikir dan perilaku bangsa Indonesia. Karenanya, masyarakat Indonesia perlahan bergerak menuju kondisi kehilangan identitas keindonesiaannya. Oleh karena itu, tulisan ini melihat pentingnya wacana transformasi Pancasila sehingga diharapkan bisa menjadi solusi

atas tantangan kebangsaan tersebut. Transformasi Pancasila dapat dilakukan melalui (1) Transformasi bersifat menyeluruh atau holistik, tidak bisa bersifat parsial. (2) Transformasi juga meliputi perubahan pola pikir masyarakat (mindset). (3) Transformasi ini juga perlu di landasi oleh cahaya ilmu pengetahuan.

**Kata kunci:** Globalisasi, Identitas Keindonesiaan, Transformasi Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

### **PERAN KERJA SAMA IMT-GT DALAM PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS ASEAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 69-83**

*Indonesia-Malaysia—Thailand Growth Triangle* (IMT-GT) merupakan salah satu kerja sama ekonomi subregional yang diakui oleh ASEAN berperan penting dalam membangun konektivitas ASEAN. Namun demikian, perbedaan karakter geografis dan perbedaan kepentingan antartiga negara anggotanya berpeluang menghambat implementasi IMT-GT dalam membangun konektivitas tersebut. Studi ini difokuskan pada tiga hal, yaitu arti penting IMT-GT bagi masing-masing negara anggotanya, implementasi program-program IMT-GT tahun 2012-2016, dan peran IMT-GT dalam membangun konektivitas ASEAN, khususnya di sektor maritim. Melalui metode kualitatif bersifat deskriptif korelatif, studi ini menemukan bahwa IMT-GT berkontribusi hampir 50% bagi perekonomian Malaysia, mendukung visi Poros Maritim Dunia bagi Indonesia, serta mendorong kemajuan wilayah Thailand Selatan yang relatif tertinggal. Temuan lainnya, capaian program IMT-GT 2012-2016 masih rendah, terutama di sisi Indonesia akibat terlalu banyaknya program yang dicanangkan. Terakhir, IMT-GT berperan dalam membangun konektivitas ASEAN melalui pengembangan lima koridor ekonomi, walaupun masih lebih dominan pada dimensi darat dibanding dimensi maritim.

**Kata kunci:** ASEAN, IMT-GT, konektivitas, dan maritim

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

### **POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK: MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN**

**Jurnal Penelitian Politik**  
**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 85-98**

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang menggembarakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi instrumen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

**Kata kunci:** Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**BAHASA SEBAGAI ARENA DAN  
INSTRUMEN KEKUASAAN**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Hlm. 99-106**

Buku ini menelaah politik penggunaan bahasa dari beragam aspek. Bahasa tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi tetapi lebih dari itu, bahasa dapat menjadi alat yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Bahasa beroperasi sebagai piranti kekuasaan dan berhasil dimanfaatkan secara optimal oleh mereka yang memiliki niat berkuasa. Bahasa dapat digunakan untuk praktik dominasi, alat pergerakan, melanggengkan kekuasaan, mendulang suara dan memenangkan pemilihan, sampai meraih keuntungan materil.

**Kata kunci:** bahasa, politik, kekuasaan, Indonesia

---

**DDC: 320.54 : 352.14**

**Aisah Putri Budiatri**

## **THE DICHOTOMY OF INDONESIAN AND PAPUAN IDENTITIES IN THE POST-NEW ORDER ERA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 1-15**

*The narratives about the dichotomy of Indonesian and Papuan identities are almost founded in every analysis of Papuan political identity. The previous research emphasis on the discussion about the Dutch colonial experience, the history of Papua's integration into Indonesia and the failure of development under New Order era as the key reasons for the genesis of the dichotomy. The colonial periode and New Order era have become their research focus since the Papuan identity as an antithesis of Indonesian-ness was born and grew under this political period. Then, how is about the political identities in Papua under Post-New Order? This article shows that the antithesis dichotomy between Papuan and Indonesian identities still occurs, even though several policies to resolve the conflict, including the Special Autonomy Law, have been implemented. In fact, the dichotomy of identities in Papua has sharpened and potentially worsened the conflict.*

**Keywords:** *identity, Papua, Papuan-ness, Indonesian-ness, conflict, post-New Order*

---

**DDC: 305.5**

**Wasisto Raharjo Jati**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY**

## **PILLAR IN INDONESIA**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 17-29**

*This article is aims to analyse middle class as one of the main actors in Indonesian democratization process. Discussion on middle class studies in Indonesian social and political science discourse have been dominated economic understanding based quantitative method. It was an academic challenges for Indonesian social scientist to redefine terminology of middle class. The position of middle class as the political actor in Indonesia still fluctuated due to unclearly standing in terms of relation state and society. On one hand, the middle class could perform as resistant groups against the political regime. In other hand, the Indonesian middle class presumably become subordinated groups towards the political regime. It can be indicated in Indonesia post Authoritarian era, the middle class groups performs itself as the political initiator from grass roots level. That main motivation from Indonesian middle class in recent political era are make alternative representation in order to articulate aspiration. The emergence of internet especially social media have been perceived as political machine that stimulated middle class to make critical points toward government today.*

**Keyword:** *Democratization, Middle Class, Society.*

---

**DDC: 324.6**

**Dina Fadiyah**

## **UNDERSTANDING INDONESIAN MIDDLE CLASS AS DEMOCRACY PILLAR IN INDONESIA**

*This paper intends to see the relationship between Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) with Forkabi in Jakarta 2012 Election. Basically, Forkabi stand up because they felt treat from immigrants. Forkabi originally founded on ethnicity but later transformed into a political extension of a local elite. CSOs that were supposed to be free of political interests, became the political extension of Foke-Nara during the campaign period in the 2012 Jakarta Governor election. This paper uses descriptive qualitative method and found that community organizations can play an important role in a local election. Proven with the local elites are currently aggressively used organizations as the tim to win the election. The success of this case because members of mass organizations are widespread everywhere. Starting from the level of RT, RW, Village, District, etc. This proves that the existing mass organizations can not be independent or do not have political interest.*

**Keywords:** Mass Organization, Forkabi, Patron, Client.

---

**DDC: 302.3**

**Septi Satriani**

**PERANAKAN AND SERAT  
KEKANCINGAN: AN IDENTITY OF  
“ABDI DALEM” IN YOGYAKARTA  
PALACE**

*This paper focus on how the concept of peranakan and serat kekancingan became the identity of abdi dalem of Kraton Yogyakarta. Peranakan is not just a uniform but the symbol of brotherhood and control of behavior. I assume that the peranakan and serat kekancingan is a symbol of identity. When the abdi dalem wearing a peranakan and having serat kekancingan, they will behave according to the value that contained by them.*

**Keywords:** Identity, Abdi Dalem in Yogyakarta Palace, Peranakan, Serat Kekancingan

---

**DDC: 320.509598**

**Siswanto**

**THE TRANSFORMATION OF  
PANCASILA AND INDONESIAN  
IDENTITY**

*The ideology of Pancasila as the basis of the state and the worldview is increasingly abandoned by the Indonesian nation. Pancasila as a reference of political and social life is weakening in the midst of globalization that influence the mindset and behavior of the Indonesian people. Therefore, the people of Indonesia move to the condition that they lost of Indonesian Identity. This paper sees the importance of discourse about transformation of Pancasila, so that it is expected to be a solution to the challenge of nationality. Transfromasi Pancasila can be done through (1) Transformation is holistic, can not be partial. (2) Transformation also involves about changing the mindset of the community. (3) This transformation also needs to be grounded by the light of science.*

**Keywords:** Globalization, Indonesia Identity, Transformation of Pancasila

---

**DDC: 327**

**Sandy Nur Ikfal Raharjo**

**THE ROLE OF IMT-GT  
COOPERATION IN THE ASEAN  
CONNECTIVITY DEVELOPMENT**

*Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) is recognized as one of the sub-regional cooperation to support ASEAN Community. However, geographical character differences and consequently creating different interests among three member states, is likely to hinder the implementation of the IMT-GT in establishing such connectivity. This study focuses on three issues, namely, the significance of IMT-GT for each member state, implementation of IMT-GT's programs in 2012-*

2016, and the role of IMT-GT in building ASEAN connectivity, particularly in the maritime sector. Through correlative descriptive qualitative method, this study found that the IMT sub-region contributes nearly 50% for the Malaysian economy, supports the Indonesian vision of Global Maritime Fulcrum for Indonesia, as well as encourages the development of less-developed Southern Thailand region. In Addition, the implementation of IMT-GT's programs in 2012-2016 was still low, especially on the side of Indonesia due to too many programs were planned. Another finding was that IMT-GT has played significant role in building the ASEAN connectivity through the development of five economic corridors, although it was still more on land connectivity rather than maritime connectivity.

**Keywords:** ASEAN, IMT-GT, connectivity, and maritime

---

**DDC: 327.51**

**Siswanto**

**INDONESIAN FOREIGN POLICY  
TOWARD CHINA:  
FIGHTING THE NATIONAL  
INTERESTS IN ASYMMETRIC  
POWER RELATIONS**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 85-98**

*This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations*

*such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)*

**Keywords:** Foreign policy, power imbalance, national interest

---

**DDC: 302.222**

**Anggi Afriansyah**

**LANGUAGE AS FIELD AND  
INSTRUMENTS OF POWER**

**Jurnal Penelitian Politik**

**Vol. 14, No. 1, Juni 2017, Page 99-106**

*This book examines the use of language in variety aspects of life. Language is not only used as a medium of communication but more than that, can be an effective tool to gain power. Language operates as an instrument of power and successfully utilized optimally by those who have the intention to to get power. Language can be used to dominate others, means of struggle, preserve power, won the election, and achieve economic benefits.*

**Keywords:** Language, politic, power, Indonesia

**RESUME PENELITIAN**  
**POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP TIONGKOK:**  
**MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN NASIONAL DI TENGAH**  
**KETIDAKSEIMBANGAN KEKUATAN**

***RESEARCH SUMMARY***  
***INDONESIAN FOREIGN POLICY TOWARD CHINA:***  
***FIGHTING THE NATIONAL INTERESTS IN ASYMMETRIC POWER***  
***RELATIONS***

**Siswanto, Ganewati Wuryandari, Nanto Sriyanto, Mario Surya Ramadhan,**  
**Rizka Fiani Prabaningtyas**

Pusat Penelitian Politik\_Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia  
Email: sish\_jakarta@yahoo.com

Diterima: 17 Maret 2017; direvisi: 14 April 2017; disetujui: 8 Juni 2017

***Abstract***

*This paper would like to describe Indonesia's foreign policy towards China in the Reform period. As we known that Indonesia-China bilateral relations have been going on since the 1950s. The relations have ups and downs condition in accordance with the dynamics of domestic politics of each country. It is exciting that in Reform period that bilateral cooperation has been increasing especially in the field of politics and economy. In other hand, there is obstacle in this bilateral cooperation. The cooperation based on imbalance power relation (asymmetric power relations) which will affect to the bargaining position of each country in struggling for national interests. China as a nation with greater national power will be easier in fighting for its national interests compared to Indonesia as a country with smaller national power. To solve the obstacle, Indonesia's position as a middle power country can be a strategic instrument in facing China. Position as an middle power is based on a number of identifications of its capacity and political behavior in international relations such as ; a diplomatic initiator in realizing stability / security and peace in the region. Finally, in closing remark that this paper is expected to give input to the direction of Indonesian foreign policy towards China so that it has more bargaining position in fighting its national interests against China in the midst of imbalance power (asymmetric power relations)*

***Keywords:*** *Foreign policy, power imbalance, national interest*

**Abstrak**

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di masa Reformasi. Seperti diketahui bahwa hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok yang sudah berlangsung sejak dekade 1950-an mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika politik dalam negeri masing-masing negara. Sesuatu yang mengembirakan bahwa di era Reformasi ini kerja sama bilateral tersebut semakin meningkat khususnya dibidang politik dan ekonomi. Hanya saja yang menjadi masalah bahwa kerja sama ini dihadapan kepada kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) yang berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan nasional (*national power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan nasional lebih kecil. Untuk mengimbangi hal itu, posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*) bisa menjadi insturmen strategi dalam menghadapi Tiongkok. Keberadaan sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilaku politiknya dalam hubungan internasional sebagai inisiator diplomatik

dalam mewujudkan stabilitas/keamanan dan perdamaian di kawasan. Akhirnya, sebagai penutup bahwa tulisan ini diharapkan akan memberi masukan terhadap arah politik luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok sehingga lebih memiliki posisi tawar dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya terhadap Tiongkok di tengah-tengah ketidak seimbangan kekuatan tersebut.

**Kata kunci:** Politik luar negeri, ketidakseimbangan kekuatan, kepentingan nasional

## Pendahuluan

Pada Juli 1950 Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok.<sup>1</sup> Seperti tertuang dalam catatan sejarah bahwa Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang membuka hubungan diplomatik tersebut. Hubungan kedua negara mengalami pasang-surut dan memasuki masa pasang (mendekat) saat Indonesia dipimpin Presiden Sukarno. Misalnya akibat dari kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia, Indonesia terkucil dari pergaulan internasional. Situasi ini membuat politik luar negeri Indonesia mendekat kepada Tiongkok. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa kerjasama kedua negara, seperti ratifikasi perjanjian dwikewarganegaraan dengan Tiongkok tahun 1960, ratifikasi perjanjian persahabatan dengan Tiongkok pada Agustus 1961, saling kunjung pejabat tinggi, bantuan ekonomi pemerintah Tiongkok kepada Indonesia sebesar AS\$ 41 juta pada tahun 1958, dan bantuan pembangunan gedung olahraga tahun 1959 pada saat Indonesia menjadi tuan rumah *Asian Games* dan *Ganefo (Games of the New Emerging Forces)* (1962). Hubungan kedua negara mencapai puncaknya pada saat realisasi Poros Jakarta-Peking melalui pidato Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1965.<sup>2</sup>

Sebaliknya, hubungan kedua negara mengalami masa surut (menjauh) ketika Presiden Suharto menggantikan Presiden Sukarno. Soeharto melakukan perubahan arah politik

luar negeri Indonesia. Hal ini diwujudkan dengan pembekuan hubungan diplomatik dengan Tiongkok pada bulan Oktober 1967 karena dugaan keterlibatan Tiongkok pada peristiwa G30S/PKI tahun 1965. Indonesia memerlukan waktu kurang lebih selama 23 tahun untuk memulihkan kembali hubungan dengan Tiongkok.<sup>3</sup> Menurut Franklin B. Weinstein hal ini disebabkan Indonesia masih menganggap Tiongkok sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya. Pembekuan hubungan diplomatik itu juga merupakan kepentingan nasional untuk menarik perhatian negara-negara Barat. Dengan membangun citra sebagai negara antikomunis, Indonesia berharap dapat menarik bantuan dan pinjaman luar negeri dari negara-negara tersebut.<sup>4</sup>

Selama terjadi pembekuan diplomatik itu, hubungan Indonesia dan Tiongkok berada pada tingkat nadir. Kedua negara tidak melakukan kerjasama politik keamanan, namun hubungan dagang kedua pihak masih berlanjut secara terbatas melalui perantara pihak ketiga, seperti Hongkong. Kedua negara memiliki kesempatan untuk kembali mencairkan hubungan diplomatik ketika pemimpin kedua negara bertemu, yang terjadi pada saat Indonesia berkeinginan untuk menjadi ketua Gerakan Non-Blok 1992. Pada saat pemakaman Kaisar Hirohito, kontak pertama yang membahas pencairan hubungan kedua negara berlangsung antara Presiden Soeharto dengan Menlu Qian Qichen pada tahun 1989. Pertemuan tersebut menyepakati lima prinsip dasar, yaitu saling menghormati integritas masing-masing, tidak saling melakukan agresi, tidak saling mencampuri urusan dalam negeri,

<sup>1</sup> Perubahan nama China menjadi Tiongkok berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES. KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang penggantian istilah Tionghoa/Tiongkok menjadi Tjina. Sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok maka perlu memulihkan penggunaan istilah Tiongkok. Untuk penyebutan selanjutnya, kajian ini menggunakan istilah Tiongkok yang merujuk pada China atau Republik Rakyat China (RRC).

<sup>2</sup> Ganewati Wuryandari, "Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama", dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 107

<sup>3</sup> Zainuddin Djafar, *Rethinking the Indonesian Crisis*, Bandung, Pustaka Jaya, 2006, hlm. 45. Tri Nuke Pudjiastuti, "Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru", dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 119.

<sup>4</sup> Franklin B. Weinstein, *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno to Soeharto*, (Singapore, Equinox Publishing, 2007), hlm. 226-227.

persamaan derajat dan kemanfaatan bersama, serta hidup berdampingan secara damai. Setahun kemudian pada 8 Agustus 1989, penandatanganan nota kesepahaman tentang normalisasi hubungan diplomatik RI-RRC ditandatangani oleh Menlu kedua negara di Istana Negara Jakarta, disaksikan oleh Presiden Soeharto dan PM Li Peng.<sup>5</sup>

Setelah melakukan normalisasi, kedua negara mulai menjalin hubungan baik di berbagai bidang tetapi masih menghadapi kendala. Salah satunya adalah masih berlanjutnya persepsi Tiongkok sebagai ancaman yang pada akhirnya memunculkan kecurigaan dan sensitifitas politik terhadap negara Tirai Bambu itu. Hal ini antara lain diindikasikan dengan keberadaan TAP MPRS No. XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan dan Pembubaran PKI, yang masih berlaku hingga saat ini, dan kerusuhan di Medan April 1994 serta kerusuhan di Jakarta Mei 1998 yang pada akhirnya menjadi kerusuhan anti-etnis Tionghoa.

Pada era Reformasi iklim kerja sama Indonesia-Tiongkok semakin kondusif. Indonesia membutuhkan Tiongkok sebagai mitra kerja sama ekonomi dan politik-keamanan, sebaliknya Tiongkok juga demikian. Kondisi saling membutuhkan dan saling mendukung kepentingan nasionalnya ini menjadi pertimbangan utama terlaksana kerja sama bilateral di berbagai bidang. Tiongkok sebagai negara besar di lain pihak Indonesia sebagai negara kekuatan menengah berpotensi menuju kepada kerja sama saling menguntungkan, tetapi kondisi ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetric power relations*) ini juga berpotensi kepada kerja sama yang cenderung memberi keuntungan lebih besar kepada kepentingan Tiongkok atau kurang adil terhadap kepentingan Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara tersebut menuntut keberpihakan strategi kepada kepentingan nasional.

Dalam dinamika politik regional persepsi terhadap Tiongkok sebagai ancaman di kawasan Asia-Pasifik masih ada. Persepsi ini merujuk pada perilaku asertifnya, peningkatan anggaran militernya, dan manuver militer pada konflik Laut China Selatan.<sup>6</sup> Indonesia merupakan

<sup>5</sup> Wisnu Dewabrata. 2015. "Pencarian Kembali Hubungan, Kemenangan Diplomasi Indonesia", *Kompas* 26 Juni 2015

<sup>6</sup> Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of

*non-claimant state* dalam konflik Laut China Selatan, tetapi memiliki tumpang tindih klaim atas ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna dengan *Nine-Dash Line* Tiongkok.<sup>7</sup> Terkait dalam hal ini, Tiongkok memberikan pernyataan pengakuan atas kedaulatan wilayah Indonesia di Natuna, tetapi tidak terhadap wilayah ZEE nya. Oleh karena itu, Indonesia tetap perlu membangun kerja sama bilateral, tetapi mewaspadai sikap Tiongkok terhadap kawasan tersebut.

Berangkat dari permasalahan di atas, kajian ini mengajukan tiga pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok? Bagaimana peluang dan tantangan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok? Apa strategi kebijakan luar negeri yang harus dikembangkan oleh Indonesia terhadap Tiongkok di masa depan?

### ***Dimensi Teoritis Negara Besar dan Negara Kecil dalam struktur Internasional***

Struktur internasional membagi negara-negara di dunia ke dalam beberapa kategori berdasarkan kapasitas yang dimilikinya.<sup>8</sup> David R. Mares (1988) membagi empat kategori negara dalam hubungan internasional yaitu: *Pertama*, kekuatan besar. Negara-negara ini masuk dalam kategori kekuatan besar karena memiliki kemampuan untuk menentukan aturan dan mengontrol dalam sistem internasional, baik dalam sistem bipolar, multipolar, maupun hegemonik. *Kedua*, kekuatan sekunder. Negara-negara yang masuk ke dalam kategori sekunder memiliki kemampuan untuk mengganggu sistem internasional melalui tindakan unilateral namun tidak bisa mengubah sistem internasional tersebut. *Ketiga*, kekuatan menengah. Negara-negara dengan kekuatan menengah ini tidak mampu mempengaruhi sistem internasional melalui tindakan

Re-Engagement", *Asian Survey*, (August 2009).

<sup>7</sup> Zhao Hong, "China-Indonesia Economic Relations: Challenges and Prospects", *ISEAS Perspective* 42, Singapore, ISEAS, (4 July 2013), hlm. 3.

<sup>8</sup> David R. Mares, "Middle Powers under Regional Hegemony: To Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement", *International Studies Quarterly*, Vol 32, No 4, (December 1988), hlm. 456.

individual negaranya, namun memiliki sumber daya yang mencukupi untuk beraliansi dengan negara lain dalam jumlah yang kecil, sehingga dapat mempengaruhi sistem internasional. *Keempat*, kekuatan kecil. Negara-negara yang masuk kategori kekuatan kecil memiliki karakter berupa tidak mampu mempengaruhi sistem internasional melalui tindakan individual negaranya, sehingga harus bersekutu dengan negara lain dalam jumlah besar, dimana keanggotaan negara ini dalam aliansi dengan negara lain, juga tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi aliansi tersebut.<sup>9</sup>

Di samping kategorisasi di atas terdapat juga kategorisasi lain berdasarkan negara kuat dan negara lemah. Menurut Michael I. Handel (1990), kuat lemahnya kekuatan negara-negara adalah relatif berdasarkan dua ukuran. *Pertama*, kapasitas internal yang berupa kekuatan militer dan letak geografis. *Kedua*, kapasitas eksternal yang berupa aliansi dengan negara lain secara formal dan posisi yang tidak seimbang dalam hubungan antara negara besar dan negara kecil.<sup>10</sup> Dalam kenyataannya, hubungan yang tidak seimbang antara negara kekuatan kecil dengan negara kekuatan besar membuka peluang dominasi negara besar terhadap negara kecil yang relatif memiliki pilihan yang lebih sedikit dalam menyusun kebijakan luar negerinya.

Berdasarkan kategori di atas, Tiongkok dan Indonesia bisa diidentifikasi keberadaan atau kategorinya.. Dalam hal ini, keberadaan Tiongkok sebagai negara besar dalam konsep Mares dan Handel dan Indonesia sebagai menengah dengan segala karakteristiknya dan kapasitasnya. Sebagaimana tersebut di atas identifikasi kategorisasi berdasarkan kapasitas dan karakter yang dimiliki dalam berperilaku di forum internasional. Karena kedua negara memiliki kategori berbeda maka posisi tawar kedua negara juga memiliki perbedaan. Secara

teori, tentu saja Tiongkok dengan kategori sebagai lebih negara besar memiliki posisi tawar lebih kuat, sedangkan Indonesia sebagai negara lebih kecil memiliki posisi tawar lebih lemah. Dengan posisi tawar yang lebih kuat menyebabkan Tiongkok lebih mudah pula dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya, sebaliknya Indonesia dengan posisi tawar yang lebih lemah menyebabkan lebih sulit atau lebih berat pula dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya karena lebih sedikit pilihan kebijakan luar negerinya.

### **Metodologi dan Teknik**

Periode waktu yang menjadi hirauan dalam penelitian ini mengambil rentang waktu sejak era Reformasi 1998 hingga tahun 2016. Pada masa itu sejak masa kepresidenan Habibie yang berganti dengan masa Abdurrahman Wahid dan Megawati dapat dikatakan beberapa langkah pembuka hubungan kedua negara di dalam sistem politik nasional yang mengalami proses demokratisasi. Periode tersebut juga meliputi sepuluh tahun jabatan Presiden SBY (2004-2014) yang ditandai dengan peningkatan signifikan hubungan Indonesia-Tiongkok melalui dua perjanjian strategis, yaitu *Comprehensive Partnership 2005* dan *Strategic Partnership 2013*. Sementara, hubungan Indonesia-Tiongkok pada masa Presiden Jokowi juga menjadi fokus penelitian hanya hingga sampai tahun 2016 pada saat laporan penelitian ini ditulis.

Kajian ini didasarkan metodologi kualitatif di mana analisa dilakukan melalui metode deskriptif analitik. Data-data diperoleh melalui empat teknik, yaitu: *pertama*, studi pustaka mengenai hubungan Indonesia-Tiongkok pada buku, jurnal, majalah, makalah seminar/konferensi, artikel koran, dan artikel website; *kedua*, wawancara mendalam dengan narasumber yang memahami masalah hubungan Indonesia-Tiongkok dalam konteks ekonomi, politik, dan keamanan; *ketiga*, diskusi terfokus dengan narasumber yang terdiri atas praktisi di kementerian/lembaga, diplomat, akademisi, wartawan, dan perwakilan organisasi asing di Indonesia; *keempat*, studi lapangan di Beijing, Tiongkok, untuk melakukan diskusi terfokus dengan para ahli hubungan Indonesia-Tiongkok di wilayah tersebut..

<sup>9</sup> Steven E. Lobell, Neal G. Jesse, and Kristen P. Williams, "Why Secondary States Choose to Support, Follow or Challenge", *International Politics*, Vol 52, No 2, (2005).

<sup>10</sup> Michael I. Handel, "Weak States in the International System", London, Taylor and Francis, 1990, di Svetlana Durdevic-Lukic, *Bringing The State Back: Strong versus Weak States*, 2006, [http://www.diplomacy.bg.ac.rs/mpro\\_sa06\\_1-2.htm#\\_ftn21](http://www.diplomacy.bg.ac.rs/mpro_sa06_1-2.htm#_ftn21), diunduh 27 Maret 2015.

## Peta Kekuatan dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok

Sekalipun persepsi Indonesia terhadap Tiongkok kadang kala masih diwarnai perspektif ancaman, hubungan bilateral kedua negara perlahan tetapi pasti menuju kepada kondisi kondusif karena adanya perubahan orientasi politik domestik di kedua negara. Perubahan tersebut terlihat dari mulai ditinggalkannya kebijakan protektif Tiongkok terhadap diaspora etnis Tionghoa di Indonesia, sebaliknya kebijakan Indonesia di era reformasi lebih mengutamakan lagi pragmatisme. Arah kebijakan luar negeri kedua negara semakin kondusif untuk peningkatan hubungan bilateral. Sikap pemerintah Tiongkok pada kasus kerusuhan Medan 1994 yang dinilai pemerintah Indonesia mencampuri urusan domestiknya, pemerintah Tiongkok pada kasus

Tragedi 1998 secara resmi menilai hal itu adalah persoalan domestik Indonesia.<sup>11</sup>

Pada saat yang bersamaan, Presiden Aburrahman Wahid melaksanakan politik rekognisi kepada etnik Tionghoa di Indonesia yang membuka lebih luas hak politik dan budaya yang selama ini dikekang. Di forum internasional Presiden Abdurrahman Wahid juga menginisiasi *Southwest Pacific Dialogue* yang melibatkan Tiongkok, Australia, India, Papua Nugini, Timor Leste, dan Selandia Baru tahun 2000.<sup>12</sup> Hubungan baik juga dapat dilihat dari intensitas dan frekuensi saling kunjung pejabat negara, kerjasama ekonomi, sosial budaya dan teknologi pertahanan.<sup>13</sup> Menguatnya hubungan kedua negara terefleksikan dengan penandatanganan Kemitraan Strategis dan Kemitraan Strategis yang komprehensif, yang ditandatangani pada masa Presiden SBY, masing-masing pada tahun 2005 dan 2013. Pada tahun 2015, Kemitraan Strategis tersebut diperkuat pada masa Presiden Joko Widodo melalui *Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People's Republic of China and the Republic of Indonesia*.

<sup>11</sup> Rizal Sukma, "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-Engagement". *Asian Survey*. (August, 2009).

<sup>12</sup> Zhao Hong, "China-Indonesia Economic Relations: Challenges and Prospects", *ISEAS Perspective 42*, Singapore, ISEAS, (4 July 2013).

<sup>13</sup> *Ibid.*

Semakin kondusifnya hubungan bilateral tersebut dilihat dari sisi Tiongkok bahwa sejak dipimpin Presiden Xi Jinping tahun 2012 kebijakan luar negerinya mengalami perubahan. Dia memiliki sejumlah kebijakan yang berbeda dengan pendahulunya, tetapi tetap menjaga kesinambungan kepemimpinan dengan baik di Tiongkok, pembaruan itu meliputi: (1) Presiden Xi Jinping mengembangkan *new diplomacy (wai jiao xin zheng)* yang memiliki ciri aktif dan asertif dalam perilaku internasionalnya; dan (2) sejak kepemimpinan Xi Jinping, pengambil keputusan masalah luar negeri dan akademisi menjadi lebih vokal dalam mengekspresikan kepentingan nasional dan ambisi Tiongkok untuk memainkan peran dalam masalah-masalah internasional.

Dengan demikian, faktanya Tiongkok memiliki pendekatan baru dalam kebijakan luar negeri (*new diplomacy*) yang menimbulkan kekhawatiran di kawasan. Kebijakan luar negeri Tiongkok memiliki ciri berbeda dengan sebelumnya dalam melindungi kepentingan nasionalnya. Seperti diketahui dalam Buku Putih pembangunan Tiongkok tahun 2011 tercantum butir-butir kepentingan nasional yaitu: (1) kedaulatan nasional, (2) keamanan nasional, (3) keutuhan wilayah, (4) persatuan nasional, (5) sistem politik berdasarkan konstitusi dan mempertimbangkan ketertiban umum.<sup>14</sup> Dengan demikian, Tiongkok menjaga dan memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan segala sumberdaya atau kekuatan yang dimiliki,<sup>15</sup> baik kekuatan politik, diplomasi, ekonomi, hukum, budaya, dan militer.<sup>16</sup> Pendekatan baru kebijakan luar negeri tersebut lebih menuntut penggunaan kekuatan militer dan tekanan politik ketimbang diplomasi damai.

Selanjutnya, jika hubungan bilateral tersebut dilihat dari sisi kebijakan luar negeri Indonesia maka terdapat sejumlah faktor domestik yang mempengaruhinya baik dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dari unsur pemerintah hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dari waktu ke waktu banyak ditentukan oleh

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> J. Zhang, *Op.Cit.*, hlm. 8.

<sup>16</sup> Pidato Presiden Xi Jinping pada Kongres PKT ke-18 tahun 2013

pemimpinya. Misalnya Soekarno menjalin hubungan dekat dengan Tiongkok tidak terlepas dari dimensi ideologi politik yang diyakini dalam memajukan Indonesia pasca Proklamasi kemerdekaan 1945. Indikasi kedekatan hubungan di masa Soekarno terlihat dari dikembangkannya Poros Jakarta-Peking pada tahun 1960 atau 5 tahun setelah hubungan diplomatik kedua negara resmi dibuka.

Sebaliknya kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok menjauh pasca tragedi G-30S/PKI 1965 atau di awal dan pertengahan kepemimpinan Soeharto. Dalam hal ini, ideologi pembangunan pada masa Orde Baru berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri tersebut. Indonesia di bawah Soeharto membuat jarak bahkan memutuskan hubungan diplomatik, tetapi di akhir kepemimpinannya melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Indonesia menjauh dari Tiongkok sebagai kebutuhan untuk membangun identitas sebagai rezim yang anti-komunis karena dengan identitas tersebut berharap lebih mudah dalam memperoleh bantuan luar negeri dari negara-negara 'Barat' yang pada masa itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk melakukan penataan ekonomi dan pembangunan nasional.

Posisi Indonesia sebagai negara kekuatan menengah memiliki sumberdaya politik dalam menyikapi faktor eksternal yang mempengaruhi hubungan Indonesia-Tiongkok. Faktanya, kebijakan Indonesia terhadap Tiongkok tidak terlepas dari kondisi lingkungan strategisnya. Dalam hal ini, persaingan AS-Tiongkok di bidang politik-keamanan dan ekonomi merupakan faktor eksternal yang cukup mempengaruhi arah kebijakan Indonesia terhadap Tiongkok. Persaingan politik-keamanan bisa dilihat dari tarik-ulurnya konflik di Laut China Selatan dan penempatan pasukan AS di bagian utara Australia dan persaingan ekonomi bisa dilihat dari kemunculan kerja sama *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang dimotori oleh AS dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang dimotori oleh Tiongkok. Posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah cenderung melakukan inisiatif diplomatik dan memanfaatkan institusi regional ASEAN agar persaingan dua kekuatan negara besar tersebut tidak mengarah

kepada gangguan keamanan yang dapat menjurus kepada ancaman bagi stabilitas kawasan.

Untuk mengetahui capaian dan evaluasi kemajuan kerja sama Indonesia-Tiongkok perlu juga dicermati kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di era Reformasi, khususnya pada masa Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Dalam hal ini, capaian penting kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di era Presiden SBY adalah berhasil disepakatinya kerja sama politik dan ekonomi. Kerja sama ini meliputi kemitraan strategis tahun 2005 dan ditingkatkan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada tahun 2013. Kedua kesepakatan kerja sama ini sebagai indikasi ada potensi besar bahwa kedepan kedua negara dapat mengembangkan mitra kerja sama yang diharapkan saling menguntungkan bagi kepentingan nasionalnya masing-masing pihak.

Berikutnya, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Tiongkok di era Presiden Jokowi dapat di nilai ingin menjalin kerja sama yang erat, namun keinginan itu belum bisa tercapai sebagaimana yang diharapkan. Meskipun sebagian kalangan menggambarkan hubungan kedua negara mengalami masa bulan madu, faktanya kerjasama ekonomi dan pertahanan masih jauh dari nilai strategis bagi Indonesia. Hubungan hangan kedua negara ditopang oleh fondasi yang kokoh, seperti belum terjalannya hubungan neraca perdagangan yang seimbang dan menguntungkan kedua pihak.<sup>17</sup> Pemerintahan Jokowi memandang keberadaan Tiongkok memiliki arti strategis, antara lain dapat dilihat dalam pernyataannya saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Tiongkok atas undangan Presiden Xi Jinping pada tanggal 26 Maret 2015. Jokowi menyatakan bahwa "Tiongkok merupakan teman dekat Indonesia, sahabat Indonesia, mitra strategis yang komprehensif yang saling melengkapi satu dengan yang lain". Pada aspek geo-strategis dan geo-ekonomi, Indonesia tentu sadar akan pentingnya untuk terus memanfaatkan peluang kerjasama dengan Tiongkok. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong pemerintahan Jokowi untuk memperkuat kemitraan strategis yang komprehensif yang

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Atase Perdagangan Indonesia di Beijing 17 Mei 2016

telah disepakati pada pemerintahan SBY dengan “*Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia*” pada tahun 2015.<sup>18</sup>

Pada era pemerintahan Jokowi, meskipun Indonesia tetap memandang penting hubungan dengan Tiongkok, Indonesia menilai kepentingan ekonominya tidak boleh mengganggu persoalan geopolitik dan keamanan wilayah nasionalnya. Hal ini terlihat dalam sikap Jokowi dalam menghadapi tiga kali insiden pelanggaran wilayah Indonesia di perairan Natuna pada tahun 2016. Tidak hanya melalui retorika diplomatik melainkan juga melalui tindakan kehadiran negara di wilayah perairan tersebut.

Namun demikian, Hubungan bilateral Indonesia-Tiongkok dihadapkan pada masalah ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetrical power relations*) yang merupakan situasi tidak menguntungkan bagi Indonesia. Ketidakseimbangan hubungan Indonesia – Tiongkok bisa dilihat dari kapasitas diplomasi, militer, dan ekonomi kedua negara. Ketiga kapasitas kedua negara merupakan unsur penting dari kekuatan nasional suatu negara dan berdampak langsung kepada kemampuannya dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, suatu negara yang lemah kapasitas-kapasitasnya maka akan lemah pula kemampuannya dalam memperjuangkan kepentingan nasional dan sebaliknya. Dengan demikian, keberadaan kapasitas-kapasitas tersebut adalah strategis. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal itu di bawah ini ditampilkan 3 tabel.

<sup>18</sup> “Indonesia, China Forge Comprehensive Strategic Partnership in Various Field”, Antara News, 7 Oktober 2013 diakses melalui <http://www.antaranews.com/en/news/91035/indonesia-china-forge-comprehensive-strategic-partnership-in-various-field>, tanggal 13 April 2016. Lihat juga, “Joint Statement on Strengthening Comprehensive Strategic Partnership between the People’s Republic of China and The Republic of Indonesia”, Ministry of Affairs of the People’s Republic of China, 27 Maret 2015, [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/wjdt\\_665385/2649\\_665393/t1249201.html](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1249201.html), diakses pada 21 Juli 2016.

**Tabel. 1.** Kapasitas Diplomasi Global Indonesia dan Tiongkok 2016

Indikator	Indonesia	Tiongkok	Total Negara/Perwakilan	Rasio Perbandingan
Peringkat Umum	20	3	42	1 berbanding 7
Peringkat G-20	16	3	20	1 berbanding 5
Perwakilan di Luar Negeri	134	258	5931	1 berbanding 2

Sumber : *Global Diplomacy Index 2016* <sup>19</sup>

Tabel di atas menginformasikan data kemampuan diplomasi global Indonesia dan Tiongkok. Perbedaan besar kapasitas diplomasi global kedua berada pada indikator peringkat umum. Kapasitas diplomasi Tiongkok pada indikator tersebut adalah 7 kali lipat dari kapasitas Indonesia atau 700 %. Sedangkan, perbedaan yang terkecil dari kapasitas diplomasi kedua negara berada pada indikator perwakilan di luar negeri. Kapasitas Tiongkok dalam indikator ini adalah 2 kali lipat dari kapasitas Indonesia atau 200 %. Dari data-data tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa secara rata-rata kemampuan umum diplomasi global Tiongkok atas Indonesia adalah 1 setengah kali lipat atau 150 %. Kemampuan diplomasi global Tiongkok di atas Indonesia, namun perbedaannya tidak terlalu mencolok.

**Tabel.2** Kapasitas Militer Indonesia dan Tiongkok 2016

Indikator	Indonesia	Tiongkok
	Senjata	Pasukan
Peringkat Umum	14	3
Pasukan aktif	476.000	2.335.000
Pesawat Udara (seluruh jenis)	420	2.942
Kekuatan Tank	468	9.150
Armada Laut	221	714
Anggaran Pertahanan (per tahun dalam dolar)	6.900.000.000	155.600.000.000

Sumber: *Comparisons of World Military Strengths* <sup>20</sup>

Data pada tabel di atas menginformasikan kapasitas militer Indonesia dan Tiongkok. Perbedaan kapasitas terbesar dari kedua negara berada pada indikator Anggaran Pertahanan. Kemampuan Tiongkok membiayai kapasitas militernya 25 kali lipat kemampuan Indonesia

<sup>19</sup> Lowy Institute for International Policy, “Global Diplomacy Index 2016”. <https://www.lowyinstitute.org/global-diplomacy-index/#>, diakses pada 13 Desember 2016.

<sup>20</sup> GFP, “Comparisons of World Military Strengths.”. <http://www.globalfirepower.com/countries-comparison.asp>, diakses pada 13 Desember 2016.

atau mencapai 2500 %. Sebaliknya, perbedaan terkecil dari kapasitas militer kedua negara berada pada indikator Peringkat Umum dan Armada Laut. Kapasitas militer Tiongkok pada kedua indikator hanya 3 kali lipat atas Indonesia atau mencapai angka 300 %. Dari data-data tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa secara rata-rata kemampuan umum militer Tiongkok atas Indonesia adalah 62 kali lipat atau 6200 %. Perbedaan kapasitas militer kedua negara sangat besar.

Jika kedua unsur dari kekuatan nasional disandingkan maka terlihat sangat mencolok perbedaannya. Dalam kapasitas diplomasi global hanya 1.5 kali lipat atau 150 %, sedangkan dalam kapasitas militer seperti tersebut di atas mencapai 62 kali lipat atau 6200 %.

**Tabel.3.** Kapasitas Ekonomi Indonesia dan Tiongkok 2014-2016

Indikator	Indonesia	Tiongkok
Gross National Income (GNI) (SUS, 2014) <sup>21</sup>	923.738.000	10.096.966.000.000
Cadangan Devisa Negara (SUS, 2016) <sup>22</sup>	102.100.000	3.230.000.000
Index Daya Saing Global <sup>23</sup>	Urutan ke- 34	Urutan ke -28

Sumber : World Bank, Trading Economic, World Economic Forum.

Data pada tabel di atas menunjukkan kapasitas ekonomi Indonesia dan Tiongkok. Perbedaan kapasitas ekonomi terbesar kedua negara berada pada indikator Pendapatan Nasional Bruto (gross national income) berada pada angka 100.000 kali lipat karena Pendapatan Nasional Bruto hanya pada kisaran ratusan juta sedangkan Tiongkok pada kisaran puluhan triliun. Sedangkan perbedaan kapasitas terkecil pada indikator daya saing global yang berada pada angka hampir sama yaitu Indonesia di urutan ke-34 dan Tiongkok ke-28 hanya terpaut selisih 6 poin, pendeknya kemampuan daya asing kedua negara hampir sama.

<sup>21</sup> World Bank, "Gross National Income 2014, Atlas Method", <http://data.worldbank.org/data-catalog/GNI-Atlas-method-table>, diakses pada 11 Februari 2016.

<sup>22</sup> Trading Economics, "Cadangan Devisa", <http://id.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves>, diakses pada 11 Februari 2016.

<sup>23</sup> World Economic Forum, "Global Competitiveness Report 2014", <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>, diakses pada 27 Maret 2015.

*Asymmetrical power relations* antara Indonesia dan Tiongkok juga tercermin dalam sektor investasi. Investasi kedua negara menunjukkan ketidakseimbangan. Tiongkok sejak menjalankan kebijakan *open door policy* yang dimulai tahun 1979 telah menjadi destinasi investasi modal global. Seiring keberhasilan kebijakan tersebut, Tiongkok tidak sekedar menjadi tujuan investasi tetapi juga melakukan investasi ke negara lain, termasuk Indonesia. Pada tahun 2009 misalnya, nilai investasi Indonesia di Tiongkok hanya mencapai \$111,7 juta, angka ini hanya 2,4% dari nilai investasi enam negara anggota ASEAN di Tiongkok. Sebaliknya, komitmen Tiongkok untuk melakukan investasi asing ke Indonesia juga relatif lebih rendah dibandingkan investasi serupa di berbagai negara ASEAN. Pada tahun yang sama, total investasi asing Tiongkok ke Indonesia mencapai \$ 592 juta atau 10% dari total investasi asing Tiongkok ke ASEAN. Investasi Tiongkok menduduki peringkat kesepuluh sebagai negara yang melakukan investasi asing langsung di Indonesia periode 2011 hingga triwulan kedua tahun 2016. Komitmen investasi Tiongkok ke Indonesia dalam periode tersebut mencapai US \$52,8 miliar tetapi realisasinya baru mencapai US \$3 miliar.

Tidak hanya itu, *asymmetrical power relations* antara dua negara di atas tercermin jelas dalam neraca perdagangan luar negeri Indonesia-Tiongkok yang tidak seimbang. Selama periode 2007-2011 misalnya, impor Indonesia dari Tiongkok ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor Indonesia ke Tiongkok. Import Indonesia dari Tiongkok senilai \$ 354.751.673 atau trendnya 20.15 %, sebaliknya ekspor Indonesia kepada Tiongkok senilai 304.220.726 atau 9.24 %. Fakta tersebut dapat dilihat lebih lengkap dalam Tabel Data Komoditas Impor Indonesia dari Tiongkok dan Tabel Data Komoditas Ekspor Indonesia ke Tiongkok (lihat lampiran).

Defisit perdagangan Indonesia terhadap Tiongkok telah menimbulkan kekhawatiran pemerintah Indonesia bahwa produk-produk Tiongkok kemungkinannya akan semakin menguasai pasar domestik jika daya saing produk dalam negeri tidak ditingkatkan. Derasnya arus impor barang-barang buatan Tiongkok juga berpeluang menjadi ancaman

bagi ketahanan produk dalam negeri, seperti makanan, minuman, buah-buahan, dan industri garmen (batik cetak). Kekhawatiran ini, terlihat ketika pemerintah Indonesia mencoba untuk melakukan negosiasi ulang dengan Tiongkok dalam kerangka *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) pada 2011. Namun, upaya negosiasi yang dilakukan Indonesia kandas di tengah jalan. Hal ini membuktikan bahwa ketidakseimbangan kekuatan tersebut mempersulit Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya.

Realisasi investasi Tiongkok yang masih rendah bisa jadi disebabkan oleh kondisi infrastruktur Indonesia yang belum baik. Kondisi ini terlihat dalam indeks infrastruktur Indonesia tahun 2011 yang hanya menempati urutan ke 76 untuk infrastruktur fisik, urutan ke 106 untuk kualitas pelabuhan, dan urutan 98 untuk ketersediaan jaringan listrik. Meskipun presiden SBY telah menempatkan pembangunan infrastruktur dalam prioritas utama *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia* pada Mei 2011 tetapi ironinya proporsi anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur justru turun 50% pada anggaran 2011 dibanding awal 1990-an. Kondisi infrastruktur yang buruk ini menjadi kendala utama dalam pembangunan di Indonesia karena pada gilirannya akan menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia, biaya transportasi menjadi mahal sehingga produk Indonesia tidak kompetitif. Oleh karena itu perbaikan infrastruktur menjadi sebuah keniscayaan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi Indonesia. Dalam konteks ini, Tiongkok memiliki posisi yang strategis sebagai sumber investasi di Indonesia karena ekonominya menempati posisi kedua terbesar di dunia. Peran serta Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur melalui aliran investasi modalnya diharapkan dapat membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang saat ini menjadi agenda prioritas pembangunan pemerintahan Joko Widodo.

Peningkatan hubungan bilateral yang baik tidak hanya menjadi kepentingan Indonesia tetapi juga menjadi kepentingan Tiongkok. Melalui kebijakan *Good Neighbour* dan *Charm Diplomacy*, Tiongkok menekankan hubungan

bilateral dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Tiongkok melihat Indonesia sebagai bagian integral dalam keterlibatan Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Melalui kebijakan *One Belt One Road*, Tiongkok berusaha mengamankan kepentingan ekonominya di kawasan sekaligus mengangap kebijakan tersebut sinergis dengan visi Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Dinamika hubungan Indonesia-Tiongkok tidak terlepas dari perubahan-perubahan dalam politik luar negeri Tiongkok dalam beberapa decade. Pada masa Perang Dingin, Mao Zedong berusaha mengarahkan kebijakan luar negeri Tiongkok menjadi lebih revisionis, dengan mengampanyekan perang kebebasan rakyat. Sejalan dengan hal tersebut, Tiongkok di masa Mao Zedong menggalang solidaritas negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika, dengan hadirnya Perdana Menteri Zhou Enlai pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955.

Di Era Deng Xiaoping, politik luar negeri Tiongkok menjadi lebih pragmatis, dengan menjalankan kebijakan pintu terbuka. Hal ini juga didukung oleh perkembangan politik internasional dimana terjadi detente antara AS dan Uni Soviet. Pasca Perang Dingin, penguasa Tiongkok berusaha menjalin kedekatan hubungan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Hal ini didorong oleh ketakutan Tiongkok akan potensi isolasi dunia internasional pasca tragedi Tiananmen tahun 1989 sekaligus peluang perubahan konstelasi politik internasional di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kebutuhan Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, telah mendorong negara ini untuk bergabung dalam jejaring perdagangan global, melalui keterlibatannya di dalam WTO pada tahun 2001. Bergabungnya Tiongkok ke dalam WTO berdampak pada fenomena melesatnya pertumbuhan ekonomi negara ini hingga mencapai dua digit dari tahun 2003-2007, sekitar 10%-14,2%. Kekuatan ekonomi Tiongkok yang sedang tumbuh, tetap kuat meskipun dunia sedang dilanda krisis global pada tahun 2008. Meskipun mengalami penurunan tetapi pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih lebih

baik dari negara-negara maju lainnya, di atas 7% hingga tahun 2015.

Kemajuan ekonomi menyebabkan peningkatan kepercayaan diri Tiongkok untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Tiongkok memahami bahwa tingkat kemajuan ekonomi yang sudah dicapai perlu terus dipertahankan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonominya tersebut. Hal ini mendorong Presiden Xi Jinping mengeluarkan kebijakan ekonomi *new normal*, yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak lebih rendah dari 6,5% per tahun. Sasaran kebijakan ini adalah pencapaian kemakmuran masyarakat yang tingkat pendapatan per kapitanya sepertiga dari pendapatan per kapita Amerika Serikat. Guna mencapai target tersebut dalam kongres nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 tahun 2013, Presiden Xi Jinping menegaskan pelaksanaan politik luar negeri Tiongkok harus menggunakan semua kekuatan baik politik, diplomasi, ekonomi, hukum, budaya, dan militer untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri ini untuk mewujudkan *Chinese dream*.

Sejalan dengan kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin terhubung dengan jejaring internasional, negara ini juga semakin memperlihatkan keaktifan dalam berbagai forum dan kerjasama regional maupun internasional. Hal ini terefleksi melalui tingginya partisipasi Tiongkok di organisasi kawasan (SCO, ASEAN Plus Three, ARF, EAS), dan kesepakatan perdagangan bebas (ACFTA, RCEP, TPP). Keterlibatan Tiongkok ke dalam organisasi regional seperti ARF, *ASEAN Plus Three*, dan EAS, dapat berkontribusi positif terhadap eksistensi Tiongkok di kawasan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi regional tersebut. Namun, partisipasi tersebut tidak selalu diiringi dengan kepatuhan Tiongkok terhadap norma yang berlaku dalam mekanisme kerjasama tersebut. Misalnya, dalam kasus Laut China Selatan

### **Indonesia dan Tiongkok dalam Percaturan Global-Regional**

Dalam konteks ekonomi, kebutuhan Tiongkok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mendorong negara ini untuk bergabung

dalam jejaring perdagangan global, melalui keterlibatannya di dalam WTO pada tahun 2001. Bergabungnya Tiongkok ke dalam WTO berdampak pada fenomena melesatnya pertumbuhan ekonomi negara ini hingga mencapai dua digit dari tahun 2003-2007, sekitar 10%-14,2%. Kekuatan ekonomi Tiongkok yang sedang tumbuh, tetap kuat meskipun dunia sedang dilanda krisis global pada tahun 2008. Meskipun mengalami penurunan tetapi pertumbuhan ekonomi Tiongkok masih lebih baik dari negara-negara maju lainnya, di atas 7% hingga tahun 2015.<sup>21</sup> Kemajuan ekonomi menyebabkan peningkatan kepercayaan diri Tiongkok untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Tiongkok memahami bahwa tingkat kemajuan ekonomi yang sudah dicapai perlu terus dipertahankan di tengah perlambatan pertumbuhan ekonominya tersebut. Hal ini mendorong Presiden Xi Jinping mengeluarkan kebijakan ekonomi *new normal*, yaitu mempertahankan pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak lebih rendah dari 6,5% per tahun. Sasaran kebijakan ini adalah pencapaian kemakmuran masyarakat yang tingkat pendapatan per kapitanya sepertiga dari pendapatan per kapita Amerika Serikat.<sup>22</sup> Guna mencapai target tersebut dalam kongres nasional Partai Komunis Tiongkok ke-18 tahun 2013, Presiden Xi Jinping menegaskan pelaksanaan politik luar negeri Tiongkok harus menggunakan semua kekuatan baik politik, diplomasi, ekonomi, hukum, budaya, dan militer untuk menjaga kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri ini untuk mewujudkan *Chinese dream*.<sup>23</sup>

Melalui kebijakan *Good Neighbour* dan *Charm Diplomacy*, Tiongkok menawarkan hubungan bilateral dengan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Tiongkok melihat Indonesia sebagai negara yang punya posisi strategis dalam

<sup>21</sup> "Pertumbuhan ekonomi Cina terlamban dalam 25 tahun terakhir," [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160118\\_majalah\\_cina\\_pertumbuhan\\_ekonomi](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/01/160118_majalah_cina_pertumbuhan_ekonomi) diakses pada 27 Oktober 2016.

<sup>22</sup> Martin Wolf, 2016, "China's Struggle for A New Normal", *Financial Times*, 22 Maret 2016.

<sup>23</sup> Lu Shi Wei, "China's Diplomacy in the New Period: Changes and Consistency", *China Institute of International Studies* No 3, (2006).

menjalin kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia-Tenggara maupun Asia-Pasifik. *One Belt One Road* salah satu program yang ditawarkan oleh Tiongkok. Di balik program ini sebenarnya Tiongkok sedang berusaha mengamankan kepentingan ekonominya di kawasan Asia-Pasifik dan dunia. Hal lain yang membuat posisi Indonesia di hadapan Tiongkok karena mengangap program tersebut bersinergis dengan visi Poros Maritim Dunia yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Artinya ada kesamaan kepentingan Indonesia dan Tiongkok untuk mengembangkan kerja sama antara berbagai negara di kawasan.

Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan politik, ekonomi dan keamanan yang besar memiliki kemampuan untuk mempengaruhi negara lain dalam melaksanakan kebijakan luar negerinya. Sebaliknya, Indonesia dalam merespon kebijakan Tiongkok perlu berlandaskan pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan memperhatikan kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi, walaupun Indonesia membutuhkan kerja sama ekonomi dengan negara tersebut. Di samping itu, Indonesia juga bisa mengimbangi situasi ketidakseimbangan kekuatan (*asymmetrical power relations*) dengan meningkatkan posisi tawarnya melalui strategi pemberdayaan posisi Indonesia sebagai *middle power*.

Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam hal ini dapat melakukan inisiatif diplomatik dengan mengedepankan norma lokal yang berdasarkan pada *ASEAN Way* dan *Bandung Spirit*. *ASEAN Way* pada nyatanya adalah sebuah norma yang juga mendasarkan pada *Bandung Spirit* yang berkembang pada pengakuan negara sebagai aktor sentral dalam stabilitas regional. Disamping itu, Indonesia juga dapat menjalin kerja sama atau bergabung dengan sesama negara *middle power*. Strategi aliansi longgar semacam ini juga meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Tiongkok, di lain pihak juga dapat memperluas diplomasi multilateral Indonesia yang berdampak positif kepada kepentingan nasional Indonesia.

Selain itu upaya untuk menempatkan forum multilateral sebagai forum yang berimbang dan seminimal mungkin terdominasi oleh

kekuatan negara besar menjadi sangat penting bagi Indonesia. Doktrin *dynamic equilibrium* yang digagas oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, menjadi operasionalisasi dari kebijakan luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi soko guru politik luar negeri Indonesia. Dalam forum multilateral yang memberi ruang bagi negara besar dan negara kecil, kasus kegagalan komunike bersama ASEAN saat KTT di Kamboja 2012 dapat dihindari di kemudian hari. Forum demikian akan menjadi ruang bersama di mana *hedging strategy* Indonesia, dalam hal ini *dynamic equilibrium*, dapat di jalankan. Oleh karenanya sentralitas ASEAN tidak dapat dihindarkan dalam perkembangan arsitektur regional, baik di bidang ekonomi maupun politik keamanan.

### **Catatan Penutup: Bagaimana Strategi Indonesia Menghadapi Tiongkok**

Walau bagaimanapun kondisi ketidakseimbangan (*asymmetric power relations*) hubungan Indonesia-Tiongkok sedikit-banyak berpengaruh terhadap posisi tawar (*bargaining position*) masing-masing negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Secara teori negara dengan kekuatan nasional (*nasional power*) yang lebih besar akan lebih mudah dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya dibanding dengan negara dengan kekuatan nasional lebih kecil.

Oleh karena itu, strategi Indonesia dalam menghadapi Tiongkok perlu memposisikan dirinya sebagai negara kekuatan menengah (*middle power*). Keberadaannya suatu negara sebagai kekuatan menengah didasarkan pada pada sejumlah indentifikasi yaitu kapasitas yang dimiliki dan perilakunya dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, kapasitas yang dimaksudkan adalah kemampuan suatu negara berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut: ekonomi, keamanan, dan politik. Sedangkan, perilaku disini adalah aktivitas negara dalam berperan sebagai mediator dan menjadi inisiatif diplomasi untuk terwujudnya stabilitas, keamanan, dan perdamaian. Perilaku lain dari negara kekuatan menengah biasanya adalah menjadi pemimpin di kawasan atau lingkungannya. Di samping itu, perilaku dari

negara kekuatan menengah biasanya menolak adanya suatu hegemoni, sebaliknya lebih memilih multipolarisme atas sistem internasional di level regional maupun global.

Berpijak pada posisi sebagai negara kekuatan menengah Indonesia menghadapi Tiongkok dapat melakukan langkah-langkah strategi eksternal antara lain mengedepankan strategi *dynamic equilibrium* dan mengkampanyekan prinsip multilateralisme dalam tatanan politik internasional di kawasan. Dominasi oleh salah satu kekuatan besar akan merugikan negara-negara di kawasan tersebut karena tatanan politik internasional di kawasan itu akan dikontrol oleh negara besar bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan manuver diplomatik di tengah persaingan kekuatan besar di kawasan Asia-Pasifik agar tidak terjadi hegemoni oleh salah satu kekuatan besar tersebut. Sejumlah kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Rusia saling memperebutkan pengaruhnya, namun demikian persaingan pengaruh di Asia-Pasifik saat ini utamanya mengerucut pada persaingan pengaruh antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Indonesia sebagai kekuatan menengah punya peran strategis untuk melakukan diplomasi multilateral agar salah satu dari kekuatan besar yang dominan tersebut yaitu Tiongkok atau AS tidak menjadi kekuatan hegemon di kawasan Asia Pasifik khususnya.

Sementara itu, strategi internal yang perlu dilakukan Indonesia adalah peningkatan kapasitas dalam berdiplomasi. Kapasitas diplomasi Indonesia menghadapi Tiongkok perlu ditingkatkan secara kualitas dan kuantitas. Peningkatan kualitas Diplomasi Indonesia terhadap Tiongkok dilakukan dengan cara penguatan sumber daya manusia yang lebih handal. Hal ini diperlukan untuk memaksimalkan perjuangan kepentingan nasional menghadapi Tiongkok diberbagai bidang baik politik, ekonomi, maupun keamanan. Dengan demikian, penguasaan pengetahuan diplomasi tahap mahir dan bahasa mandarin bagi diplomat Indonesia yang bertugas di Tiongkok menjadi suatu keutamaan jika ingin sukses dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya menghadapi Tiongkok. Selain dari itu, peningkatan kuantitas intitusi diplomasi

Indonesia di Tiongkok juga perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Indonesia sebagai negara yang dipandang strategis oleh Tiongkok, perlu mengimbangnya dengan cara *mereview* struktur Kantor Perwakilan Indonesia di sana. Pemerintah Indonesia perlu peningkatan jumlah institusi diplomasinya di luar kota Beijing. Misalnya Indonesia sebagai negara besar dan strategis di hadapan Tiongkok perlu meningkatkan jumlah kantor Konsulat Jenderal di Tiongkok. Hal ini diperlukan agar pelayanan kerja sama Indonesia-Tiongkok dapat ditingkatkan lagi dan pada gilirannya akan membantu pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

Jadi, infrastruktur diplomasi Indonesia berpengaruh terhadap perjuangan kepentingan nasional Indonesia atas Tiongkok. Dengan peningkatan sarana-prasarana diplomatik dan kapasitas kekuatan sumberdaya manusia akan memperbaiki kinerja diplomasi Indonesia. Dalam konsep sistem masukan (*input*) berbanding lurus dengan keluaran (*output*). Keberadaan Tiongkok sebagai negara besar yang berpengaruh secara global dan regional perlu mendapat perhatian khusus dari institusi terkait. Oleh karena itu, perwakilan Indonesia yang berada di Tiongkok juga perlu mendapat perhatian khusus guna mengantisipasi kepentingan nasional Indonesia atas Tiongkok khususnya dan dunia pada umumnya. Hal ini dilakukan karena Tiongkok merupakan kekuatan ekonomi global di era Pasca Perang dingin yang wajar memperoleh perhatian khusus.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Djafar, Zainuddin. *Rethinking the Indonesian Crisis*. Bandung: Pustaka Jaya. 2006.
- Gilley, Bruce, and Andrew O'Neil. "China's Rise Through the Prism of Middle Powers". Dalam Bruce Gilley and Andrew O'Neil (eds.), *Middle Powers and the Rise of China*. Washington DC: Georgetown University Press. 2014.
- Kaarbo, Juliet, Jeffrey S. Lantis, and Ryan K. Beasley. "The Analysis of Foreign Policy in Comparative Perspectives". Dalam Ryan K. Beasley, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, Michael T. Snarr (ed.), *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*. United Kingdom: CQ Press. 2013.

- Mashad, Dhuroruddin. "Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi". Dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Murphy, Ann Marie. "Indonesia's Responds to China's Rise". Dalam Bruce Gilley and Andrew O'Neil (eds.), *Middle Powers and the Rise of China*. Washington DC: Georgetown University Press. 2014.
- Pudjiastuti, Tri Nuke. "Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru". Dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Shutter, Robert, and Chin-hao Huang. "China-Southeast Asia Relations: China's Toughness on the South China Sea-Year II". *Comparative Connections*. 2013.
- Smith, Steve, Amelia Hadfield, and Tim Dunne. *Foreign Policy: Theories, Actors, Cases*. Oxford: Oxford University Press. 2012.
- Trading Economics. (2015). *Cadangan Devisa*. <http://id.tradingeconomics.com/china/foreign-exchange-reserves>. Diunduh 11 Februari 2016.
- Weinsten, Franklin B. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence from Sukarno to Soeharto*. Singapore: Equinox Publishing. 2007.
- Wuryandari, Ganewati. "Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Lama". Dalam Ganewati Wuryandari (ed.), *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Jurnal dan Dokumen**
- Kementerian Perdagangan RI. (2014). *Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang*. <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116>. Diunduh 11 Februari 2016.
- Keppres Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/PRES.KAB/6/1967 tanggal 28 Juni 1967 tentang penggantian istilah Tionghoa/Tiongkok menjadi Tjina.
- Manicom, James, and Jeffrey Reeves. (2014). "Locating Middle Powers in International Relations Theory and Power Transitions". Dalam Bruce Gilley and Andrew O'Neil (eds.), *Middle Powers and the Rise of China*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Handel, Michael I. (1990). "Weak States in the International System". London: Taylor and Francis. Dalam Svetlana Durdevic-Luki. (2006). *Bringing The State Back: Strong versus Weak States*. [http://www.diplomacy.bg.ac.rs/mpro\\_sa06\\_1-2.htm#\\_ftn21](http://www.diplomacy.bg.ac.rs/mpro_sa06_1-2.htm#_ftn21). Diunduh 27 Maret 2015.
- Hong, Zhao. (July 4, 2013). "China-Indonesia Economic Relations: Challenges and Prospects". *ISEAS Perspective* 42. Singapore: ISEAS.
- Keohane, Robert O. (Spring, 1969). "Lilliputians's Dilemmas: Small States in International Politics". *International Organization*. Vol 23 Issue 02.
- Lobell, Steven E., Neal G. Jesse, and Kristen P. Williams. (2005). "Why Secondary States Choose to Support, Follow or Challenge". *International Politics*. Vol 52 No 2.
- Mares, David R. (December, 1988). "Middle Powers under Regional Hegemony: To Challenge or Acquiesce in Hegemonic Enforcement". *International Studies Quarterly*. Vol 32 No 4.
- Sukma, Rizal. (August, 2009). "Indonesia-China Relations: The Politics of Re-Engagement". *Asian Survey*.
- SIPRI. (2014). *Military Expenditure Database*. [http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex\\_database](http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database). Diunduh 26 Maret 2015.
- Wei, Lu Shi. (2006). "China's Diplomacy in the New Period: Changes and Consistency". *China Institute of International Studies* No 3.
- Wu, Fuzuo. (January-March, 2015). "China's Puzzling Energy Diplomacy toward Iran". *Asian Perspective*.
- Wibisono, Makarim. (October 10, 2011). "Indonesia and Global Competitiveness". *The Jakarta Post*.
- World Bank. (2015). *GDP Ranking Table 2014*. <http://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table>. Diunduh 26 Maret 2015.
- World Bank. (2015). *Gross National Income 2014, Atlas Method*. <http://data.worldbank.org/data-catalog/GNI-Atlas-method-table>. Diunduh 11 Februari 2016.
- World Bank. (2015). *Population Ranking Table 2014*. <http://data.worldbank.org/data-catalog/Population-ranking-table>. Diunduh 27 Maret 2015.
- World Economic Forum. (2014). *Global Competitiveness Report 2014*. <http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>. Diunduh 27 Maret 2015.

## Lampiran

Tabel Data Komoditas Impor Indonesia dari Tiongkok (dalam \$ US)<sup>24</sup>

No.	Kelompok Hasil Industri	2007	2008	2009	2010	2011	Trend (%)
1	Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif	2.993.364.488	5.646.230.118	4.912.777.607	6.272.549.444	8.284.111.389	23,88
2	Elektronika	1.117.416.403	3.042.059.600	3.074.277.345	5.126.699.697	5.971.014.615	47,31
3	Tekstil	346.300.055	1.025.035.193	1.034.915.291	1.682.332.145	2.299.504.746	53,45
4	Kimia Dasar	735.520.894	1.096.223.971	956.567.133	1.337.056.276	1.906.856.942	23,42
5	Alat-alat Listrik	317.171.420	621.282.842	611.926.761	965.937.274	1.227.184.615	36,99
6	Plastik	142.910.359	261.656.307	215.049.100	345.802.392	458.454.216	29,82
7	Pupuk	142.063.889	381.902.125	154.588.265	201.816.055	445.308.220	17,91
8	Pengolahan Aluminium	186.707.826	289.255.035	134.517.728	275.340.572	443.543.126	18,31
9	Keramik, Marmer dan Kaca	132.723.811	235.121.074	181.499.820	271.575.731	369.079.842	24,48
10	Barang-barang Kimia lainnya	156.287.344	220.454.029	211.139.831	268.166.288	354.751.673	20,15

Tabel Data Komoditas Ekspor Indonesia ke Tiongkok (dalam \$ US)<sup>25</sup>

No.	Kelompok Hasil Industri	2007	2008	2009	2010	2011	Trend (%)
1	Pengolahan Kelapa/Kelapa Sawit	1.408.590.634	2.008.074.991	2.038.024.537	2.500.440.415	3.191.713.195	20,38
2	Pengolahan Karet	736.384.439	896.381.903	831.682.371	1.403.628.934	1.980.612.355	27,47
3	Kimia Dasar	833.215.801	594.682.568	654.764.217	1.127.074.659	1.884.443.066	25,50
4	Pulp dan Kertas	706.001.517	938.040.771	629.462.722	853.263.031	1.000.344.974	6,21
5	Pengolahan Kayu	192.666.098	163.110.088	147.085.807	273.961.269	421.808.680	23,19
6	Elektronika	364.147.017	384.818.510	371.359.353	402.986.885	419.975.053	3,37
7	Makanan dan Minuman	227.882.914	227.036.906	82.245.634	190.384.079	412.586.536	10,64
8	Tekstil	161.962.314	174.873.766	180.589.195	300.721.563	388.245.023	25,74
9	Pengolahan Tembaga, Timah dll.	336.513.368	325.760.860	352.789.553	346.124.369	387.627.169	3,49
10	Besi Baja, Mesin-mesin dan Otomotif	227.071.736	215.718.695	441.812.460	288.822.624	305.220.626	9,24%

<sup>24</sup> Kementerian Perdagangan RI, *Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang*, 2014, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116>, diunduh 11 Februari 2016.

<sup>25</sup> Kementerian Perdagangan RI, *Neraca Perdagangan dengan Negara Mitra Dagang*, 2014, <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/balance-of-trade-with-trade-partner-country?negara=116>, diunduh 11 Februari 2016.

## TENTANG PENULIS

### **Aisah Putri Budiatri**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal, buku dan dipresentasikan di dalam konferensi nasional dan internasional. Beberapa judul artikel yang telah diterbitkan diantaranya berjudul: “Pengawasan DPR RI 1999-2004: Mewakili Partai, Mengabaikan Rakyat?”, “Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua,” “Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD),” dan beberapa artikel lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui [aisahputrib@gmail.com](mailto:aisahputrib@gmail.com).

### **Wasisto Raharjo Jati**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2012, ia menamatkan kuliah (S-1) di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah nasional dan Aktif menulis kolom opini juga di berbagai macam media massa, baik lokal maupun nasional. Ia menekuni studi tentang Politik Kelas, Kelas Menengah, Ekonomi-Politik, dan Gerakan Politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: [wasisto.raharjo.jati@gmail.com](mailto:wasisto.raharjo.jati@gmail.com)

### **Dina Fadiyah**

Penulis adalah staf pengajar di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Telah menyelesaikan S2 Ilmu Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Email: [dinafadiyah@hotmail.com](mailto:dinafadiyah@hotmail.com)

### **Septi Satriani**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Lokal, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia memperoleh Gelar Sarjana dari Ilmu Politik Universitas Gajah Mada pada tahun 1999 dan Gelar Master dari Ilmu Antropoloti Universitas Gajah Mada pada tahun 2015. Ia menekuni studi politik lokal, politik sumber daya alam, dan studi konflik. Penulis dapat dihubungi melalui: [septisatriani@gmail.com](mailto:septisatriani@gmail.com).

### **Siswanto**

Penulis kelahiran Jakarta ini menamatkan S1 pada Fakultas Sospol jurusan Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta pada tahun 1986. Selanjutnya mengikuti Program Magister pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia, dan lulus tahun 1997. Gelar doctor diraih pada Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Sejarah, Universitas Indonesia, pada tahun 2008. Sejak 1999 menjadi peneliti P2P-LIPI untuk menjabat Kepala Bidang Perkembangan Eropa. Sebagian besar karya ilmiah dan tulisannya membahas tentang kebijakan luar negeri AS dan hubungan Indonesia-AS. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi dosen tamu pada Program Studi Kajian Wilayah Amerika, Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui [sish\\_jakarta@yahoo.com](mailto:sish_jakarta@yahoo.com).

### **Sandy Nur Ikfal Raharjo**

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Internasional, Pusat Penelitian Politik-LIPI. S1 ilmu Hubungan Internasional diselesaikan di FISIP Universitas Indonesia. Gelar S2 diperoleh dari Universitas Pertahanan dengan tema Resolusi Konflik. Ia menekuni studi-studi pembangunan wilayah perbatasan, sengketa dan konflik perbatasan, serta isu-isu stabilitas keamanan regional. Penulis dapat dihubungi melalui *email*: [sandy.raharjo@gmail.com](mailto:sandy.raharjo@gmail.com).

### **Anggi Afriansyah**

Lahir di Bekasi, 17 April 1987. Setelah menyelesaikan studi sarjana di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta (2010), ia kemudian melanjutkan studi di Pascasarjana Sosiologi Universitas Indonesia (2014). Pernah menjadi guru di SMAI Al Izhar, Pengajar di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Terbuka, Akademi Kebidanan Prima Indonesia, dan STKIP Kusuma Negara, juga pernah menjadi staf di Unit Implementasi Kurikulum (UIK) Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (2015). Saat ini merupakan Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI. Anggi Afriansyah memiliki fokus kajian sosiologi pendidikan. Aktif menulis di media cetak maupun *online*. Beberapa tulisannya sudah dimuat di Koran Berita Cianjur, Jawa Pos, Koran Jakarta, Media Indonesia, Harian Republika, Lampung *Post*, Radar Bangka, Radar Tasikmalaya, Padang Ekspres, NU Online, dan [gusdurian.net](http://gusdurian.net). Dapat dihubungi melalui [afriansyah.anggi@gmail.com](mailto:afriansyah.anggi@gmail.com).

## PEDOMAN PENULISAN

1. Tulisan yang dimuat harus merupakan kajian ilmiah atas isu dan peristiwa yang berkaitan dengan politik dalam negeri dan internasional, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Tulisan merupakan karya sendiri, bukan saduran atau terjemahan dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk dan bahasa apa pun.
3. Tulisan mengandung data atau pemikiran yang baru dan orisinal.
4. Tulisan yang dimuat sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi penulis yang bersangkutan.
5. Panjang naskah untuk artikel, 20-25 halaman A4, spasi 1,5; *book review*, 10-15 halaman A4, spasi 1,5.
6. Sistematika artikel hasil pemikiran/telaahan adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

### JUDUL

#### Penulis

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

*Abstract: Abstract in English (max. 150 words)*

*Keywords: 4 – 5 words/ phrase*

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

#### Pendahuluan

#### Pembahasan

#### Penutup

#### Daftar Pustaka

7. Sistematika artikel review buku (*book review*) adalah: judul; nama penulis (tanpa gelar akademik); nama dan alamat institusi; alamat e-mail penulis; riwayat naskah; judul buku; pengarang; penerbit; cetakan; tebal; abstrak (maksimum 150 kata dalam bahasa Inggris dan 25 kata dalam bahasa Indonesia); kata kunci (4-5 kata kunci); pendahuluan; pembahasan (terbagi dalam beberapa sub-judul); penutup; daftar pustaka.

## **JUDUL**

### **Penulis**

Nama Instansi

Alamat lengkap instansi penulis

Email penulis

Riwayat naskah

Judul buku

Pengarang

Penerbit

Tebal

Abstract: Abstract in English (max. 150 words)

Keywords: 4 – 5 words/ phrase

**Abstrak:** Abstrak dalam bahasan Indonesia (maks. 250 kata)

**Kata Kunci:** 4 – 5 kata/ frasa

### **Pendahuluan**

### **Pembahasan**

### **Penutup**

### **Daftar Pustaka**

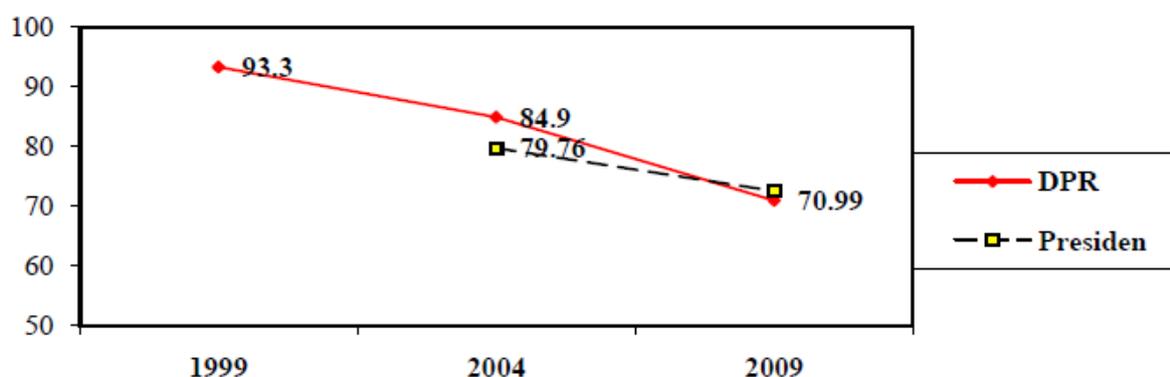
8. Tabel dan gambar, untuk tabel dan gambar (grafik) di dalam naskah harus diberi nomor urut.
  - a. Tabel atau gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar.
  - b. Sumber acuan tabel atau gambar dicantumkan di bawah tabel atau gambar.
  - c. Garis tabel yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis paling bawah tabel. Sedangkan untuk garis vertikal pemisah kolom tidak dimunculkan.

Contoh penyajian Tabel:

**Tabel 1.** Agenda-agenda Besar Konsolidasi

Domain	Vertikal	Horizontal
Internal	Pemantapan kepengurusan partai hingga level terendah Sosialisasi agenda politik	Pemantapan soliditas elite partai pada level DPP Pemantapan agenda politik menyambut pemilu
Eksternal	Pembangunan, pemeliharaan dan pemantapan dukungan masyarakat	Penjajagan koalisi dengan partai-partai lain dan kalangan institusi-institusi nonpolitik

Contoh penyajian Gambar/Grafik:



Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

**Grafik 2.** Tren Partisipasi dalam Pemilu

9. Perujukan sumber acuan menggunakan *footnotes*, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. **Format rujukan dari buku:** nama penulis, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, nomor halaman, titik. Contoh:  
Denny J.A., *Partai Politik Pun Berguguran*, (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. v.
  - b. **Format rujukan dari buku (bunga rampai):** nama penulis artikel, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik”, dalam, nama editor buku, judul buku (*italic*), kurung buka, kota penerbitan, titik dua, nama penerbit, tahun terbit, kurung tutup, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Leonardo Morlino, “Political Parties and Democratic Consolidation in Southern Europe,” dalam Richard Gunther, P. Nikiforos Diamandouros dan Hans Jurgen Puhle (eds.), *The Politics of Democratic Consolidation: Southern Europe in Comparative Perspective*, (Baltimore MD: Johns Hopkins University Press, 1995), h. 315–388.
  - c. **Format rujukan dari jurnal:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber artikel (*italic*), nomor atau edisi, tahun, h., nomor halaman, titik. Contoh:  
Lili Romli, “Peta Kekuatan Politik Setelah Reformasi dan Kecenderungan Koalisi Parpol,” *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 2000, h. 124-125.

- d. Format rujukan dari makalah seminar/konferensi:** nama penulis, “judul makalah ditulis tegak dalam dua tanda petik,” makalah, nama/tema seminar, tempat pelaksanaan seminar, waktu, h., nomor halaman, titik. Contoh:

Andrea Ceron dan Alessandra Caterina Cremonesi, “*Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media*,” makalah disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013, h 3.

- e. Format rujukan dari media online:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” nama situs, tanggal akses situs. Contoh:

Berita8, “Media Sosial bisa Perkuat Fungsi Partai Politik”, 18 April 2013, <http://www.berita8.com/berita/2013/04/MediaSosial-bisa-perkuat-fungsi-partai-politik>, diakses pada tanggal 18 Juni 2013.

- f. Format rujukan dari media massa:** nama penulis, “judul artikel ditulis tegak dalam dua tanda petik,” sumber media (*italic*), tanggal terbit, nomor halaman, titik. Contoh:

Degung Santikarma, “Monumen, Dokumen dan Kekerasan Massal,” Kompas, 1 Agustus 2003, h. 12.

10. Penulisan sumber Daftar Pustaka dibedakan menjadi: buku; jurnal; laporan dan makalah; surat kabar dan website. Daftar Pustaka dituliskan dengan urutan abjad nama belakang (*family name*). Format penulisan sebagai berikut:

- a. Format rujukan dari buku:**

Buku dengan satu pengarang: nama penulis; tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Caplan, Bryan. 2007. *The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies*. New Jersey: Princeton University Press.

Buku dengan dua pengarang: nama penulis (dua orang); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Aspinall, E. dan M. Mietzner. 2010. *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

Buku dengan lebih dari dua pengarang: nama penulis (et al); tahun terbit; judul buku; tempat terbit; nama penerbit. Contoh:

Ananta, Aris, et al., 2004. *Indonesian Electoral Behaviour: A Statistical Perspective*. Singapore: ISEAS Publishing.

Artikel/tulisan dalam buku: nama penulis; tahun terbit; judul tulisan; dalam nama editor; judul buku; tahun terbit; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Qodari, M. 2010. “The Professionalisation of Politics: The Growing Role of Polling Organisation and Political Consultants”, dalam Aspinall, E. dan M. Mietzner (eds.). *Problems of Democratisation in Indonesia: Elections, Institutions and Society*. Singapore: ISEAS Publishing.

- b. Format rujukan dari jurnal:** nama penulis; tahun; judul artikel; nama jurnal; volume jurnal; nomor jurnal; nomor halaman. Contoh:

Ufen, A. 2008. "From Aliran to Dealignment: Political Parties in post-Suharto Indonesia". *South East Asia Research*, 16 (1): 5-41.

**c. Format rujukan dari laporan dan makalah:**

Laporan penelitian: nama penulis; tahun terbit; judul laporan; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Mainwaring, Scott, 1998. "Rethinking Party Systems Theory In The Third Wave Of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization." *Working Paper* #260 - October 1998, Kellogg Institute.

Makalah seminar: nama penulis; tahun terbit; judul makalah; nama kegiatan seminar; waktu pelaksanaan kegiatan seminar; tempat penerbit; nama penerbit. Contoh:

Ceron, Andrea dan Alessandra Caterina Cremonesi. 2013. "Politicians Go Social: Estimating Intra-Party Heterogeneity (and its Effect) through the Analysis of Social Media". Paper disampaikan pada NYU La Pietra Dialogues on Social Media and Political Participation, Florence, 10-11 Mei 2013.

**d. Format rujukan dari surat kabar dan website**

Artikel media massa: nama penulis; tahun terbit; judul artikel; nama media massa; tanggal terbit; nomor halaman. Contoh:

Wahid, Sholahuddin. 1998. "Di Balik Berdirinya Partai-Partai di Kalangan NU," *Republika*, 3 Oktober.

Artikel online: nama penulis/institusi; tahun terbit; judul artikel, alamat websites; waktu unduh. Contoh:

Aspinall, Edward, "The Taming of Ethnic Conflict in Indonesia", dalam <http://www.eastasiaforum.org/2010/08/05/the-taming-of-ethnic-conflict>, diunduh pada 28 November 2013.

**11. Pengiriman Artikel:**

- ✓ Naskah dikirim dalam bentuk *printout* sebanyak 2 eksemplar beserta *softcopy* ke alamat redaksi atau dapat dikirimkan melalui email redaksi ([penerbitan.p2p@gmail.com](mailto:penerbitan.p2p@gmail.com)).
- ✓ Redaksi memberikan honorarium untuk setiap artikel yang dimuat.
- ✓ Artikel yang diterima setelah *deadline* akan dipertimbangkan untuk dimuat pada edisi berikutnya.
- ✓ Artikel dapat dikirimkan melalui website e-journal dengan alamat <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp> dengan cara mendaftar secara *online*.

**12. Alamat Jurnal Penelitian Politik:**

P2P-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III dan XI  
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710  
Telp/Fax. (021) 520 7118

**13. Langganan:**

Harga Pengganti ongkos cetak Rp.75.000,- per eksemplar sudah termasuk ongkos kirim biasa. Untuk berlangganan dan surat menyurat langsung hubungi bagian sirkulasi Redaksi Jurnal Penelitian Politik.

# Informasi Hasil Penelitian Terpilih

